



PELAYANAN LINTAS BATAS DAERAH PENDIDIKAN SMA NEGERI 1 SALATIGA DI KOTA SALATIGA DAN KABUPATEN SEMARANG

Yuniar Rizka¹ dan Hadi Wahyono²

¹Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

email : yuniarizka@gmail.com

Abstrak: Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Di Indonesia, pelayanan pendidikan menjadi program utama pemerintah yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Namun, pada kenyataannya pelayanan pendidikan tidak hanya berlaku bagi siswa yang berasal dari dalam wilayahnya saja, sehingga menimbulkan pelayanan pendidikan lintas batas daerah. Kondisi tersebut juga terjadi di SMA Negeri 1 Salatiga, yang melayani pendidikan bagi siswa dari dalam dan luar Kota Salatiga, terutama Kabupaten Semarang. Kondisi aksesibilitas yang baik, didukung dengan transportasi yang memadai serta kualitas sekolah yang baik, menyebabkan pelayanan lintas batas tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai pelayanan lintas batas daerah Pendidikan SMA Negeri 1 Salatiga di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, dengan pertanyaan penelitian "Bagaimana pelayanan lintas batas daerah SMA Negeri 1 Salatiga yang terjadi di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dan mengapa demikian?". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data yang didapat berasal dari wawancara kepada narasumber. Kajian yang dilakukan meliputi kajian kondisi pelayanan pendidikan lintas batas daerah, proses pelayanan pendidikan lintas batas daerah, dan penyebab pelayanan pendidikan lintas batas daerah. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pelayanan pendidikan di SMA Negeri 1 Salatiga tidak hanya dimanfaatkan oleh siswa dalam wilayahnya, namun juga dimanfaatkan oleh siswa dari Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, Kota Salatiga melakukan pengendalian untuk mengontrol jumlah siswa dari luar daerah. Terjadinya pelayanan pendidikan lintas batas daerah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta motivasi siswa, yang dapat dilihat dari aksesibilitas yang baik, transportasi yang mendukung, kondisi sarana prasarana sekolah yang baik, serta kualitas pendidikan. Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah dilakukan pengendalian dalam pelayanan pendidikan lintas batas daerah, kondisi tersebut akan tetap terjadi di Kota Salatiga seiring dengan kondisi lingkungan yang mendukung serta motivasi siswa yang besar.

Kata Kunci (Keywords): pelayanan lintas batas, pendidikan, SMA Negeri 1 Salatiga, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang

Abstract: Education is one of the most important pillars in improving the human quality. In Indonesia, the development of government education is the main program which is one of the obligatory functions of local government. However, in reality educational services not only apply to students who come from their region, giving rise cross-border education services. This condition also occurs in SMA Negeri 1 Salatiga, that serving education for student from within and outside Salatiga, especially Semarang Regency. Good accessibility condition, supported by adequate transportation and good quality school, a cross-border education services can not be avoided. Therefore, the writer interested to research about a cross-border education services SMA Negeri 1 Salatiga in Salatiga and Semarang Regency, with the research question "How a cross-border education services SMA Negeri 1 Salatiga in Salatiga and Semarang Regency and why?". This research using a qualitative approach, so that the data driven from interview for trainers. The result if this research is study of cross-border education services condition, study of the process of cross-border education services, and study the cause of cross-border education services. Based on the study conducted, it is known that the ministry of education in SMA Negeri 1 Salatiga utilized not only students from their region, but also utilized students from Semarang

Regency. Therefore, Salatiga control the number of students from outside the region. The occurrence of cross-border education services due to environmental conditions and students' motivation, which can be seen from good accessibility, transportation support, good school infrastructure, and good quality school. Based on the studies, it can be concluded that although it should be controlled a cross-border education services, it still happens because environmental conditions that support and students' motivation.

Keywords: *cross-border services, education, SMA Negeri 1 Salatiga, Salatiga City, Semarang Regency*

PENDAHULUAN

Dalam perencanaan wilayah dan kota, terdapat beberapa fungsi kawasan perkotaan yang terdiri dari fungsi permukiman, fungsi pemerintahan, fungsi ekonomi, dan fungsi pelayanan sosial. Dalam fungsi pelayanan sosial, terdapat pelayanan pendidikan yang menjadi salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya. Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan di masa depan. Pelayanan pendidikan di Indonesia merupakan program utama pemerintah guna mencapai sumberdaya manusia yang berkualitas, yang tentunya ditujukan kepada kebutuhan penerima manfaat layanan pendidikan, yakni berupa pendidikan formal.

Pendidikan formal ditunjukkan dengan konsep pendidikan yang sistematis, terorganisir, terstruktur, dan dikelola sesuai dengan himpunan hukum dan norma yang berlaku (Zaki, 1987). Pendidikan formal juga tidak dapat mengacuhkan kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 11 juga dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang berskala kabupaten/kota yang ditunjukkan dengan adanya lembaga pemerintah yang melayani pendidikan, yakni Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan. Di lingkup provinsi maupun kabupaten/kota, terdapat dinas pendidikan yang akan menangani pendidikan di wilayahnya. Oleh karena itu, setiap wilayah memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa yang berada dalam wilayah tersebut.

Namun, pada kenyataannya pelayanan pendidikan tidak hanya berlaku bagi siswa yang berasal dari dalam wilayahnya saja. Adanya pergerakan lintas batas melintasi batas yuridis regional, menyebabkan pelayanan pendidikan tersebut juga berlaku untuk siswa yang berasal dari luar wilayah. Kondisi tersebut dinamakan sebagai pelayanan pendidikan lintas batas daerah.

Pelayanan pendidikan lintas batas daerah yang dimaksud tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah, termasuk di Kota Salatiga. Kota Salatiga memiliki lokasi yang unik, yakni terletak di tengah-tengah Kabupaten Semarang. Selain itu, beberapa wilayah di Kabupaten Semarang yang lokasinya jauh dari pusat pelayanan (Kecamatan Ungaran Timur dan Ungaran Barat) juga mendorong masyarakat lebih memilih mengunjungi Kota Salatiga untuk mendapatkan pelayanan, termasuk pelayanan pendidikan.

Dukungan aksesibilitas yang baik juga menjadikan beberapa siswa dari Kabupaten Semarang memilih untuk bersekolah di Salatiga. Selain itu, perhatian Pemerintah Kota Salatiga dalam hal pendidikan yang menjadikan kualitas pendidikan lebih baik, juga menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa dari luar daerah. Akhirnya, pendidikan lintas batas antara Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang tidak dapat dihindari.

Kondisi tersebut terjadi di SMA Negeri 1 Salatiga, yang melayani pendidikan bukan hanya untuk siswa dari dalam Kota Salatiga. SMA Negeri 1 Salatiga memiliki beberapa daya tarik bagi siswa luar daerah, terutama Kabupaten Semarang. Lokasi sekolah yang strategis, transportasi yang mendukung, serta kualitas sekolah yang baik mendorong siswa dari luar daerah memilih sekolah ini.

Lokasi SMA Negeri 1 Salatiga yang terletak di Jalan Kemiri 1, menjadikan sekolah ini mudah diakses dari berbagai wilayah di Kabupaten Semarang. Hal ini terjadi karena

KAJIAN LITERATUR

Tinjauan Umum Pendidikan

Webster (1990) mendefinisikan pendidikan sebagai proses mendidik atau mengajar. Mendidik selanjutnya didefinisikan sebagai sesuatu untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, atau karakter siswa. Fungsi dari pendidikan adalah untuk membawa seorang individu mampu menangani kehidupan secara keseluruhan. Zaki (1987) mengklasifikasikan pendidikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang sistematis, terorganisir, terstruktur, dan dikelola sesuai dengan himpunan hukum dan norma-norma, menyajikan kurikulum yang kaku dalam hal tujuan, isi dan metodologi. Pendidikan non-formal didefinisikan sebagai pendidikan yang menerapkan kurikulum fleksibel, mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan kepentingan siswa, dan jangka waktu tergantung pada kecepatan kerja siswa. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia, sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, ketrampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk pengaruh keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan permainan, dan sebagainya. Secara singkat, pendidikan informal dapat diartikan sebagai jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Tinjauan Umum Sekolah Menengah Atas (SMA)

Wahmuji (2008) menjelaskan bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah sekolah umum selepas Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebelum perguruan tinggi. Sejalan dengan pernyataan tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 dijelaskan bahwa SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SMA merupakan satuan pendidikan formal yang termasuk dalam

pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP.

Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk dalam jenjang pendidikan menengah, yang bertujuan untuk menyiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi (Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah). Dalam pendidikan jenjang SMA, siswa menempuh pendidikan selama 3 (tiga) tahun. Pada tahun ke dua (kelas XI), siswa dapat memilih salah satu dari jurusan yang ada, yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Secara struktural, SMA Negeri merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.

Tinjauan Umum Pelayanan Pendidikan Lintas Batas Daerah

a. Pelayanan Pendidikan

Pelayanan pendidikan merupakan program utama pemerintah guna mencapai sumberdaya manusia yang berkualitas. Kualitas pelayanan pendidikan tersebut tentunya harus ditujukan pada kebutuhan penerima manfaat layanan pendidikan. Dengan kata lain, kualitas pelayanan pendidikan tersebut harus memperhatikan apa yang dirasakan oleh penerima layanan yang diberikan oleh pihak pemberi layanan, yakni sekolah (Ishartiwi, 2007). Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik sering dikaji dalam konteks mutu pendidikan yang erat kaitannya dengan kajian mengenai kualitas manajemen sekolah (Murgatroyd dalam Tola dan Furqon, 2007). Sekolah merupakan suatu sistem yang kompleks dimana di dalam sistem tersebut terdapat instrumen yang mempengaruhi terjadinya proses pendidikan. Instrumen yang ada di sekolah antara lain adalah sumber daya manusia (Kepala Sekolah, guru, administrasi, siswa, orang tua, dan lain-lain), sarana dan prasarana, dan norma atau aturan yang berlaku (Surakusumah, 2011).

b. Pelayanan Lintas Batas Daerah

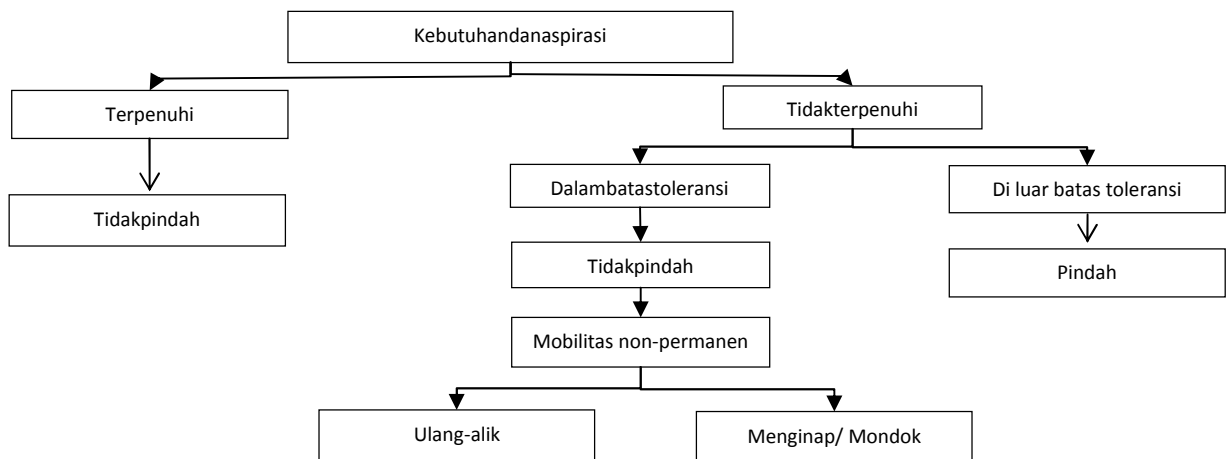
Wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik, dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional (Nasoetion, 1996). Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah

adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Dalam Negara Republik Indonesia, terdapat pembagian wilayah yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa. Dengan adanya pembagian wilayah administratif tersebut, maka terdapat batas administratif antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Batas administratif merupakan ruang dimana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam ruang tersebut.

Karena batas administratif tidak memiliki wujud nyata secara fisik, sering terjadi kegiatan yang tanpa disadari melewati batas administratif tersebut. Kegiatan tersebut akhirnya menyebabkan interaksi antar

wilayah. Menurut Yoseph S. Roucek dalam Bintarto (1989), interaksi adalah proses timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, melalui berita yang didengar, atau melalui surat kabar. Interaksi antar wilayah sering terjadi antara desa dengan kota.

Penyebab terjadinya pelayanan pendidikan lintas batas daerah didasari karena adanya kerjasama antar daerah. Terjadinya kerjasama antar daerah ini dipengaruhi oleh interaksi antar daerah, yang melibatkan pergerakan penduduk. Mantra (1999) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan seseorang dalam memutuskan untuk melakukan mobilitas, diantaranya adalah teori kebutuhan dan tekanan (*need and stress*). Di bawah ini disajikan bagan hubungan antara kebutuhan dan pola mobilitas penduduk menurut Mantra (1999):



Sumber: Mantra, 1999

Gambar 2
Hubungan antara kebutuhan dan pola mobilitas penduduk

c. Pelayanan Pendidikan Lintas Batas Daerah

Pendidikan lintas batas adalah bagaimana menjamin kualitas akademisi dan untuk mencapai pengakuan (Knight, 2008). Menurut Knight, pendidikan lintas batas mengacu pada pergerakan orang, pengetahuan, program, penyedia kurikulum, melintasi batas yuridis nasional maupun regional. Dalam pelayanan lintas batas, terdapat mobilitas lintas batas, yang dapat digambarkan sebagai gerakan program pendidikan/ pelatihan individu dan program

lintas batas melalui tatap muka atau model pembelajaran jarak jauh atau kombinasi dari keduanya (Knight, 2008).

Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

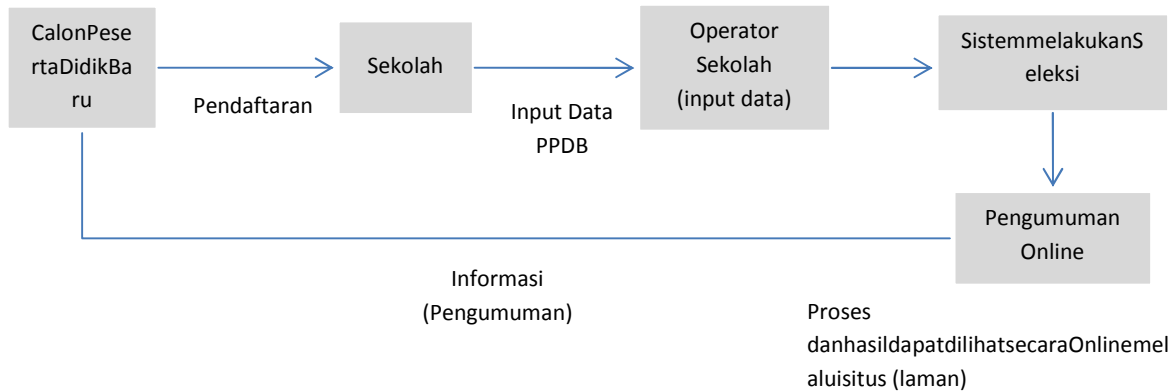
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan bahwa penyalangan pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA dan SMK merupakan kewenangan Pemerintahan

Kabupaten/Kota, kecuali untuk penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SMP, SMA dan SMK bertaraf internasional.

a. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online

PPDB *Online* merupakan sistem penerimaan siswa baru jenjang SD, SMP, serta SMA/SMK yang hasilnya dapat dilihat secara *realtime* dengan memanfaatkan teknologi internet. Tujuan PPDB *online* ini adalah:

- × Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan
 - × Menghindari penumpukan pendaftaran dalam satu lokasi
 - × Menciptakan sistem yang akuntabel, transparan, akurat dan cepat
- Beikut adalah bagan proses kerja PPDB *online*:



Sumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014

Gambar 3
Kinerja PPDB Online

Proses Pelayanan Pendidikan Lintas Batas Daerah

Proses adalah serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, dapat dijabarkan bahwa proses pelayanan lintas batas daerah adalah serangkaian langkah atau tahapan yang ditempuh berulang kali untuk mencapai pelayanan pendidikan lintas batas daerah. Dalam hal ini, proses pelayanan pendidikan lintas batas daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti kurikulum pendidikan yang digunakan serta kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilaksanakan.

Kegiatan belajar mengajar adalah kegiatan guru dan murid yang harus mempunyai pola tertentu, seperti dikemukakan oleh Hasibuan (dalam Satyaswari, 1998). Jadi, kegiatan belajar mengajar merupakan rentetan perbuatan guru dan murid yang harus memiliki pola tertentu, sehingga terjadi proses belajar mengajar dengan mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Usman (1990), guru

dituntut mampu mengelola proses belajar mengajar yang memberikan rangsangan kepada siswa, sehingga siswa mau belajar.

Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan ukuran mudah atau sulitnya suatu lokasi dicapai dengan jaringan transportasi (Black, 1981). Definisi mudah atau susah setiap orang pasti berbeda-beda, karena penilaian ini cenderung bersifat subjektif. Sebagian orang ada yang menilai aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak dari dua lokasi. Namun, karena terjadinya kemacetan untuk menuju lokasi tertentu, jarak yang dekat akan terasa jauh. Oleh karena itu, saat ini waktu lebih tepat untuk menentukan aksesibilitas pada suatu tata guna lahan dari pada jarak.

a. Lokasi

Dalam Kamus Penataan Ruang, disebutkan bahwa lokasi adalah tempat untuk kegiatan tertentu (pabrik, rumah, pelabuhan, dsb.). Lokasi memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tempat atau daerah yang bersangkutan. Pada studi geografi, lokasi

merupakan variabel yang dapat mengungkapkan berbagai hal tentang gejala yang kita pelajari (Cox dalam Sumaatmadja, 1998).

b. Transportasi

Transportasi adalah suatu proses pergerakan barang dan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan bantuan alat (kendaraan). Transportasi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memindahkan, menggerakkan, mengangkut, dan mengalihkan suatu obyek dari suatu tempat ke tempat lain (Magribi, 1970). Dalam pelayanan pendidikan, transportasi menjadi faktor penting untuk mendukung pergerakan pendidik maupun peserta didik.

Sarana dan Prasarana

Menurut Arikunto (2008) yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua keperluan yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sarana pendidikan merupakan peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar dan mengajar (Mulyasa, 2009).

Sementara, prasarana berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Bafadal (2003) menyatakan bahwa prasarana pendidikan adalah perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prasarana pendidikan adalah keperluan yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan, seperti halaman, kebun, taman sekolah, lapangan olahraga. Standar sarana dan prasarana sekolah diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007.

Kualitas Sekolah

Kualitas sekolah di Indonesia dapat diketahui melalui sistem akreditasi. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan

kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 52 Tahun 2008).

Selain berdasarkan akreditasi, kualitas sekolah dapat dilihat dari prestasi sekolah dalam berbagai kompetisi baik secara nasional maupun internasional. Dengan semakin baiknya kualitas sekolah, maka akan semakin memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk bersekolah di sekolah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Kirk dan Miller, 1986). Menurut Creswell (2013), tujuan penelitian kualitatif adalah mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah pelayanan lintas batas daerah pendidikan SMA Negeri 1 Salatiga di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai pelayanan lintas batas yang terjadi di SMA Negeri 1 Salatiga, yang melayani siswa dari dalam Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kasus. Stake (dalam Creswell, 2013) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian yang menyelidiki suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu secara cermat. Pemilihan studi kasus sebagai strategi penelitian disebabkan karena penelitian ini akan lebih

mudah dijawab dengan menggunakan studi kasus. Dengan menggunakan studi kasus, dapat diketahui penjelasan mengenai kondisi dengan pemahaman yang lebih luas.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan narasumber untuk mendapatkan data. Menurut Bungin (2010), narasumber/ informan adalah seseorang yang diduga menguasai dan memahami data, informasi, maupun fakta dari suatu obyek penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Kajian Kondisi Pelayanan Pendidikan Lintas Batas Daerah

a. Komposisi Siswa yang Memanfaatkan Pelayanan Pendidikan Lintas Batas Daerah

Pada tahun 2013, SMA Negeri 1 Salatiga membuka pendaftaran untuk 324 siswa baru. Dari 324 siswa tersebut, terdapat 52 siswa yang berasal dari luar Kota Salatiga, termasuk Kabupaten Semarang (PPDB *Online* Kota Salatiga, 2013). Kabupaten Semarang yang terletak mengelilingi Kota Salatiga menjadikan pelayanan pendidikan lintas batas dapat terjadi dengan mudah. Beberapa kecamatan yang letaknya berbatasan langsung dengan Kota Salatiga menjadi daerah asal yang mendominasi siswa yang memanfaatkan pelayanan pendidikan lintas batas daerah.

Dari 52 siswa yang berasal dari luar Kota Salatiga, 43 di antaranya merupakan siswa yang berasal dari Kabupaten Semarang. Hal ini berarti jumlah siswa baru di SMA Negeri 1 Salatiga yang berasal dari Kabupaten Semarang mencapai 13% dari total siswa yang diterima pada tahun pelajaran 2013/2014. Sementara, siswa baru dari luar Kota Salatiga yang asalnya bukan dari Kabupaten Semarang adalah 3% dari total siswa baru. Namun, jumlah siswa baru yang berasal dari dalam dan luar Kota Salatiga tersebut dilihat dari asal sekolah pada jenjang sebelumnya, yakni asal SMP siswa. Berikut adalah diagram persentase jumlah siswa baru di SMA Negeri 1 Salatiga yang berasal dari Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan selain Kabupaten Semarang:



Sumber: PPDB Kota Salatiga, 2013

Gambar 4

Diagram Presentase Jumlah Siswa Baru dari Luar Kota Salatiga Tahun Ajaran 2013/ 2014

b. Persebaran Asal Siswa yang Memanfaatkan Pelayanan Pendidikan Lintas Batas Daerah

Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, siswa yang memanfaatkan pelayanan pendidikan lintas batas daerah di Kota Salatiga sebagian besar berasal dari Kabupaten Semarang. Kondisi tersebut dipertegas dengan pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, yang menyatakan bahwa terdapat beberapa siswa asal Kabupaten Semarang yang memilih untuk melanjutkan bersekolah ke luar daerah, termasuk ke Kota Salatiga. Siswa yang bersekolah di SMA yang terletak di Kota Salatiga biasanya berasal dari wilayah yang lokasinya berdekatan dengan Kota Salatiga, seperti Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Susukan, Kecamatan Suruh, Kecamatan Jambu, Kecamatan Bringin, dan Kecamatan Getasan.

“Untuk siswa dari Kabupaten Semarang yang melanjutkan ke SMA di Salatiga, biasanya dari Kecamatan Ambarawa, Tuntang, Susukan, Suruh. Ada juga yang dari Kecamatan Jambu, kecamatan Bringin, terus dari Kecamatan Getasan. Ya intinya tadi, yang lokasinya berdekatan dengan Salatiga” (KP.A/W/02/06)

Kecamatan Tuntang, Tengaran, Pabelan, Getasan, dan Banyubiru merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Salatiga. Oleh karena itu, siswa asal Kabupaten Semarang yang berasal dari kecamatan-kecamatan tersebut mendominasi

jumlah siswa dari Kabupaten Semarang yang bersekolah di SMA Negeri 1 Salatiga. Selain dari kelima kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Salatiga, masih terdapat beberapa siswa dari kecamatan lain. Aspek lokasi yang strategis menjadi alasan utama para siswa memanfaatkan pelayanan pendidikan lintas batas tersebut. Persebaran daerah asal siswa dari Kabupaten Semarang yang bersekolah di SMA Negeri 1 Salatiga dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: Bappeda Kabupaten Semarang, 2013

Gambar 5
Peta Persebaran Daerah Asal Siswa yang memanfaatkan Pelayanan Pendidikan Lintas Batas

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa daerah asal siswa dari Kabupaten Semarang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan lintas batas daerah tersebar di hampir seluruh kecamatan. Hanya di Kecamatan Sumowono, Bandungan, dan Kaliwungu yang tidak terdapat siswa yang memanfaatkan pelayanan pendidikan lintas batas daerah di Kota Salatiga. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor lokasi, dimana Kota Salatiga berada di tengah-tengah Kabupaten Semarang.

c. Perlakuan Siswa yang Memanfaatkan Pelayanan Pendidikan Lintas Batas Daerah

Dalam hal perlakuan siswa, SMA Negeri 1 Salatiga tidak memberikan perbedaan untuk siswa dari dalam dan luar daerah. Setelah memasuki SMA Negeri 1 Salatiga, semua siswa diperlakukan sama dalam kegiatan belajar mengajar. Kondisi ini dipertegas dengan pernyataan beberapa siswa yang berasal dari

Kabupaten Semarang, yang merasa tidak terdapat perbedaan perlakuan selama bersekolah di SMA Negeri 1. Dalam kegiatan belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, organisasi, dan kegiatan lainnya, seluruh siswa diperbolehkan terlibat. Kalaupun terdapat perbedaan, hanya terjadi untuk hal-hal tertentu dan tidak begitu mencolok. Misalnya, saat sekolah bekerjasama dengan kantor-kantor kecamatan di Salatiga dalam pembuatan KTP secara massal. Kegiatan ini memang hanya berlaku untuk siswa yang berasal dari Kota Salatiga, karena berkaitan dengan aspek lokasi. Sehingga, siswa dari luar Kota Salatiga tidak merasa terganggu dengan perbedaan perlakuan tersebut.

Kajian Proses Pelayanan Pendidikan Lintas Batas Daerah

a. Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Salatiga

Pelayanan pendidikan lintas batas daerah secara hukum sudah diatur, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XIV Pasal 50 Ayat 4 bahwa pemerintah daerah propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan lintas batas daerah diperbolehkan. Pada pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 dinyatakan bahwa penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan menengah dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa dalam penerimaan siswa baru tidak diperbolehkan terdapat diskriminasi.

Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat beberapa wilayah yang memberikan pembatasan terhadap pelayanan pendidikan lintas batas tersebut. Salah satunya adalah Kota Salatiga, yang memberlakukan peraturan untuk mengendalikan pelayanan pendidikan

lintas batas daerah. Sejak tahun 2010, pengendalian dalam proses penerimaan peserta didik baru dilakukan dengan memberikan kuota dan ketentuan lain. Tujuan pengendalian tersebut adalah untuk lebih memprioritaskan pelayanan pendidikan bagi siswa dari daerah sendiri. Pada tahun 2010 dan 2011, penerimaan siswa baru untuk siswa dari luar Kota Salatiga dibatasi dengan kuota. Kemudian pada tahun 2012 mulai muncul Keputusan Walikota Salatiga dalam PPDB yang memberikan kuota yakni 90 % untuk siswa dalam kota dan 10 % untuk siswa dari luar kota serta nilai tambahan berupa nilai lingkungan. Tujuan dari penetapan nilai lingkungan tersebut adalah dalam rangka memberikan prioritas untuk peserta didik dari dalam Kota Salatiga.

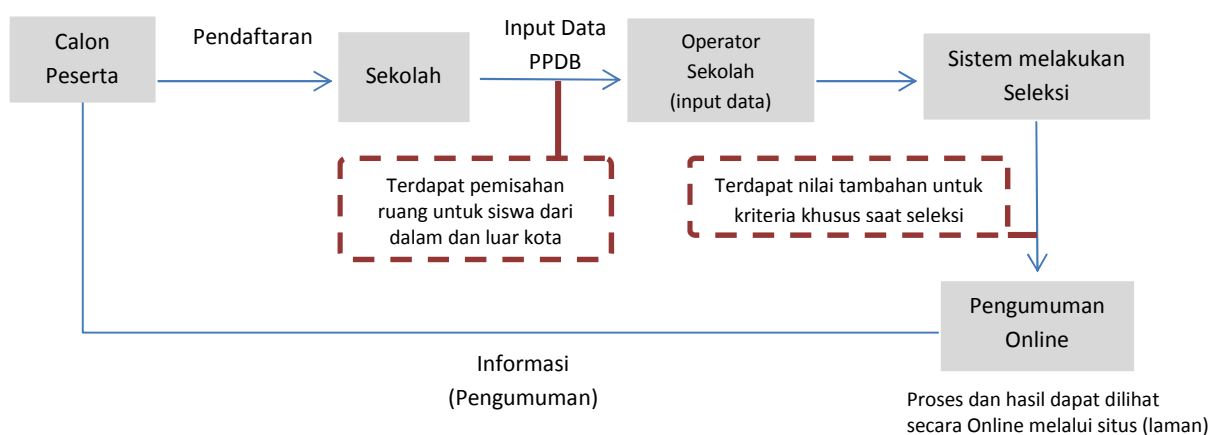
Pada tahun 2013 pengendalian untuk membatasi jumlah siswa dari luar daerah hanya dilakukan dengan memberlakukan nilai lingkungan saja. Tetapi, nilai lingkungan yang bertujuan untuk memprioritaskan siswa dari dalam kota pun justru kurang efektif. Hal ini disebabkan karena sejak sebelum diberlakukannya peraturan tersebut, kebanyakan siswa dari luar Kota Salatiga yang mendaftar ke Kota Salatiga memiliki nilai yang tinggi serta berprestasi.

Siswa dari luar kota yang dimaksud dalam PPDB adalah siswa yang asal sekolah pada jenjang sebelumnya (SMP) berasal dari luar Kota Salatiga. Sementara, siswa yang

semenjak SMP bersekolah di Kota Salatiga dianggap sebagai siswa dari dalam kota. Kondisi inilah yang menjadikan kurang efektifnya pemberlakuan kebijakan penambahan nilai lingkungan untuk siswa dari dalam kota. Akibat dari pemberlakuan kebijakan nilai lingkungan yang kurang efektif tersebut, maka tujuan dari kebijakan tersebut untuk memprioritaskan siswa dari dalam kota belum tercapai.

Pada tahun 2013, proses PPDB di Kota Salatiga sudah menggunakan sistem *online*. Pada saat pendaftaran awal pada tahap pendataan, terdapat pemisahan ruangan antara siswa dari dalam dan luar kota, yang bertujuan untuk mempermudah pada saat input data siswa ke situs PPDB *online*. Hal ini disebabkan karena pada tahap seleksi akan terdapat perbedaan antara siswa dari dalam dan luar daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa secara umum proses PPDB di SMA Negeri 1 Salatiga sudah sesuai dengan ketentuan. Tahap demi tahap dalam pelaksanaan PPDB di Kota Salatiga sudah sesuai dengan panduan kinerja PPDB *Online*. Perbedaannya hanya terletak pada saat input data dan proses seleksi, yakni dengan adanya nilai tambahan untuk siswa yang berasal dari Kota Salatiga atau asal sekolahnya di Kota Salatiga. Berikut adalah kinerja PPDB di SMA Negeri 1 Salatiga:



Sumber: Analisis peneliti, 2014

Gambar 6
Proses PPDB *Online* SMA Negeri 1 Salatiga

b. Proses Kegiatan belajar Mengajar di SMA Negeri 1 Salatiga

Pada Tahun 2013, Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMA Negeri 1 Salatiga sudah mulai menggunakan sistem SKS. Namun, dalam proses kegiatan belajar mengajar masih sama dengan sekolah lainnya. Kondisi ini diakui oleh salah seorang siswa yang menyatakan bahwa sistem SKS ini belum efektif, dikarenakan masih sama saja dengan kurikulum sebelumnya. Seharusnya, jika menggunakan sistem SKS bisa lulus SMA hanya dalam waktu 2 (dua) tahun. Namun kondisi tersebut hanya bisa dilakukan oleh siswa yang masuk ke kelas akselerasi.

Dalam proses kegiatan belajar mengajar, siswa merasa kegiatan tersebut menyenangkan. Guru dan siswa di sekolah ini terbiasa membawa suasana santai dalam kegiatan belajar mengajar. Meskipun terdapat beberapa guru yang kurang pandai menerangkan, namun siswa tetap merasa nyaman besekolah di SMA ini. Hal ini dibuktikan dengan prerstasi-prestasi yang dicetak oleh siswa SMA Negeri 1 Salatiga.



Sumber: Observasi lapangan, 2014

Gambar 7
Kondisi Kegiatan belajar mengajar Negeri 1 Salatiga

Kondisi kegiatan belajar mengajar yang kondusif tersebut juga didukung dari kompetensi pengajar yang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan demikian, para pengajar dapat menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan dasar pengetahuan yang dimiliki. Jadi, seluruh pengajar memberikan pelajaran sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Tidak terdapat guru yang mengampu mata pelajaran di luar kompetensinya.

Kajian Penyebab Terjadinya Pelayanan Pendidikan Lintas Batas Daerah

a. Kajian Kondisi Aksesibilitas SMA negeri 1 Salatiga

SMA Negeri 1 Salatiga berlokasi di Jalan Kemiri 1 Salatiga. Lokasi sekolah yang strategis, yakni berdekatan dengan jalan utama Semarang – Solo (Jalan Diponegoro) menjadi salah satu alasan sekolah ini menjadi tujuan utama bagi siswa yang berasal dari luar daerah. Berikut adalah peta lokasi SMA Negeri 1 Salatiga:



Sumber: Citra Google Earth, 2014

Gambar 8
Citra Lokasi SMA Negeri 1 Salatiga

Sebagian besar siswa SMA negeri 1 Salatiga yang berasal dari Kabupaten Semarang memilih untuk melakukan perjalanan ulang alik. Hal ini disebabkan karena lokasi SMA 1 yang cukup strategis, sehingga mudah dijangkau dengan menggunakan alat transportasi umum. Berikut ini adalah moda transportasi yang biasa digunakan siswa dari Kabupaten Semarang untuk menuju ke SMA Negeri 1 Salatiga:

Tabel 1
Moda transportasi yang digunakan siswa

Kecamatan	Moda Transportasi
Tuntang	Bus Semarang – Solo/ mini bus jurusan Salatiga – Ungaran/ mini bus jurusan Salatiga – Ambarawa/ Angkutan Kota Salatiga jurusan nomor 1
Getasan	Bus mini jurusan Salatiga – Kopeng
Banyubiru	mini bus jurusan Salatiga – Ambarawa
Ambarawa	mini bus jurusan Salatiga – Ambarawa/ bus jurusan Salatiga – Ambarawa
Pabelan	Mini bus jurusan Salatiga – Bringin/ Angkutan Kota Salatiga jurusan Nomor 3 dan Angkutan

Kecamatan	Moda Transportasi
	Kota Salatiga jurusan Nomor 2
Bawen	mini bus jurusan Salatiga – Ambarawa/ bus jurusan Salatiga – Ambarawa/ mini bus jurusan Salatiga – Ungaran
Jambu	bus jurusan Salatiga – Ambarawa dan angkutan Ambarawa – Jambu
Suruh	Mini bus jurusan Salatiga – Suruh dan Angkutan Kota Salatiga jurusan Nomor 1
Susukan	Bus Semarang – Solo/ bus mini jurusan Salatiga – Ampel dan Angkutan Kota Salatiga jurusan Nomor 1
Tengaran	Bus Semarang – Solo/ bus mini jurusan Salatiga – Ampel/ Angkutan Kota Salatiga jurusan Nomor 6 dan Angkutan Kota Salatiga jurusan Nomor 1
Ungaran Barat	Bus Semarang – Solo/ mini bus jurusan Ungaran – Salatiga
Ungaran Timur	Bus Semarang – Solo/ mini bus jurusan Ungaran – Salatiga
Bergas	Bus Semarang – Solo/ mini bus jurusan Ungaran – Salatiga
Pringapus	Bus Semarang – Solo/ mini bus jurusan Ungaran – Salatiga dan minibus jurusan Pringapus
Bringin	Mini bus jurusan Salatiga – Bringin dan Angkutan Kota Salatiga jurusan Nomor 2
Bancak	Mini bus jurusan Salatiga – Bringin dan Angkutan Kota Salatiga jurusan Nomor 2

Sumber: Analisis Peneliti, 2014

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa kondisi aksesibilitas yang baik memberikan dukungan yang besar dalam pelayanan pendidikan lintas batas daerah SMA Negeri 1 Salatiga di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan jalan utama Semarang – Solo menyebabkan lokasi ini mudah ditempuh. Selain itu, moda transportasi umum yang beraneka ragam juga mendukung terjadinya pelayanan pendidikan lintas batas daerah.

Lokasi dan moda transportasi tersebut secara tidak langsung mempengaruhi biaya yang dikeluarkan setiap harinya untuk melakukan perjalanan ke sekolah. Sebagian besar siswa yang memanfaatkan pelayanan pendidikan lintas batas di Kota Salatiga tersebut memilih untuk menggunakan jasa transportasi umum dalam melakukan perjalanan. Hal ini didasari pada pertimbangan jarak yang jauh, sehingga lebih nyaman jika memanfaatkan transportasi umum.

Untuk siswa yang tempat tinggalnya dekat dengan Kota Salatiga, biaya transportasi yang dikeluarkan lebih ringan. Sementara,

untuk siswa yang tempat tinggalnya jauh akan mengeluarkan biaya transportasi yang lebih mahal. Pernyataan ini disebutkan oleh siswa yang berasal dari Desa Gentan, Kecamatan Susukan yang memiliki jarak sekitar 26 km dari SMA Negeri 1 Salatiga. Perjalanan yang ditempuh cukup melelahkan dan memakan biaya yang besar, karena harus menggunakan 2 (dua) sampai 3 (tiga) moda transportasi untuk mencapai sekolah.

Jarak tempuh yang jauh tersebut kemudian menyebabkan beberapa siswa lebih memilih untuk menyewa kamar kos di sekitar sekolah. Alasan beberapa siswa memilih menyewa kamar kos adalah untuk menghemat waktu, dikarenakan jarak rumah yang jauh. Selain itu, siswa merasa lebih mudah dalam mencapai sekolah jika ada kegiatan di luar jam sekolah. Dengan memilih lokasi kos yang dekat dengan sekolah, maka akan menghemat biaya transportasi. Biaya transportasi yang seharusnya digunakan untuk menempuh jarak rumah ke sekolah setiap harinya digantikan dengan biaya sewa kos.

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh siswa yang memanfaatkan pelayanan pendidikan lintas batas daerah di SMA Negeri 1 Salatiga tergantung dari daerah asal dan jarak yang ditempuh. Selain itu, moda transportasi yang digunakan juga mempengaruhi biaya yang dikeluarkan. Dalam hal biaya, terdapat pula beberapa siswa yang memilih menyewa kamar kos untuk menggantikan biaya transportasi yang dikeluarkan setiap harinya.

b. Kajian Kondisi Sarana dan Prasarana

Kajian terhadap kondisi sarana dan prasarana dilakukan karena kondisi sarana dan prasarana secara tidak langsung akan memberikan pengaruh kepada siswa untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Salatiga. Berikut ini adalah perbandingan standar keberadaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Salatiga berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007:

Tabel II
Perbandingan kondisi Sarana dan Prasarana SMA
Negeri 1 Salatiga dengan Permendiknas No. 24
Tahun 2007

Standar Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana di SMA Negeri 1 Salatiga
Ruang kelas	Terdapat 32 ruang kelas
Ruang perpustakaan	Ada
Ruang laboratorium biologi	Ada
Ruang laboratorium fisika	Ada
Ruang laboratorium kimia	Ada
Ruang laboratorium komputer	Terdapat 4 laboratorium komputer
Ruang laboratorium bahasa	Terdapat 3 laboratorium bahasa
Ruang pimpinan	Ada
Ruang guru	Ada
Ruang tata usaha	Ada
Ruang beribadah	Terdapat masjid, ruang agama Kristen, ruang Agama Katolik
Ruang konseling	Ada
Ruang UKS	Terdapat 2 ruang UKS, untuk siswa dan siswi
Ruang organisasi kesiswaan	Ada
Jamban	Ada
Gudang	Ada
Ruang sirkulasi	Ada
Tempat bermain/olahraga	Terdapat lapangan olahraga dan lapangan basket

Sumber: Data Kartu Inventaris Ruangan SMA Negeri 1 Salatiga, 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan standar sarana dan prasarana sekolah, secara umum SMA Negeri 1 Salatiga sudah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Kelengkapan sarana yang dimiliki SMA Negeri 1 tersebut diakui sangat bermanfaat untuk mendukung kegiatan siswa, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan di luar jam sekolah.

Selain kondisi bangunan yang baik dan lengkap, kepuasan siswa yang bersekolah di SMA Negeri 1 Salatiga juga ditunjang dengan kebersihan yang baik. Prasarana dalam setiap ruang kelas juga menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa-siswanya. Setiap kelas memiliki kelengkapan prasarana seperti LCD, CPU, speaker, dan papan tulis. Selain ketersediaan sarana dan prasarana yang sudah lengkap dan sesuai dengan standar yang ada, sarana dan prasarana tersebut memiliki kondisi yang baik dan berih. Sehingga memberikan kenyamanan

dalam mendukung kegiatan belajar dan mengajar.

c. Kajian Kualitas Sekolah

Jika dilihat dari akreditasinya, SMA Negeri 1 Salatiga memiliki Akreditasi A yang menunjukkan bahwa kelayakan sekolah tersebut tergolong baik. Program yang dilaksanakan sekolah tersebut sudah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan yang dimaksud adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Kondisi tersebut diperkuat dengan hasil dari lulusan, yakni sebanyak 99 siswa diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit di Indonesia dengan jalur undanga pada tahun 2014 (Suara Merdeka, 2014). Sementara, jika dilihat dari prestasi sekolah, SMA 1 Salatiga sudah memiliki banyak prestasi dalam lomba-lomba maupun olimpiade di tingkat Kota, Provinsi, maupun Nasional.

Dengan adanya prestasi siswa dalam berbagai kejuaraan, maka akan terdapat media massa yang akan meliput. Dari situlah nantinya akan menjadikan daya tarik tersendiri bagi siswa dari luar daerah untuk bersekolah di SMA Negeri 1 Salatiga. Prestasi terbaru yang dicetak siswa SMA Negeri 1 Salatiga adalah terpilihnya 2 (dua) siswa untuk mengikuti kompetisi intel di Amerika Serikat, yakni Dwi Indah Anggraini dan Gigih Setyawan (Faris, 2014). Pada bulan April 2014, siswa SMA Negeri 1 Salatiga mendapatkan medali emas dalam Olimpiade Geografi dan Geosains ITB (OG2ITB) 2014 (Jurnalwarga.com, 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelayanan pendidikan di SMA Negeri 1 Salatiga tidak hanya dimanfaatkan oleh siswa dari dalam kota, melainkan dari wilayah di sekitarnya, terutama Kabupaten Semarang. Namun mayoritas siswa yang memanfaatkan pelayanan pendidikan lintas batas daerah tersebut berasal dari kecamatan yang lokasinya berdekatan dengan Kota Salatiga, yakni Kecamatan Tuntang,

Ambarawa, dan Bawen. Oleh karena itu, meskipun pelayanan pendidikan lintas batas daerah secara hukum diperbolehkan, Kota Salatiga tetap melakukan pengendalian untuk mengontrol jumlah siswa dari luar Kota Salatiga dengan memberikan peraturan mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB). Namun, pemberlakuan peraturan yang ditetapkan tidak begitu berpengaruh terhadap pelayanan pendidikan lintas batas daerah di SMA Negeri 1 Salatiga, karena biasanya siswa dari luar Kota Salatiga adalah siswa yang pandai.

Terjadinya pelayanan pendidikan lintas batas daerah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta motivasi siswa. Kondisi lingkungan dapat dilihat dari aksesibilitas yang memberikan dukungan besar dalam pelayanan pendidikan lintas batas daerah SMA Negeri 1 Salatiga di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Lokasi sekolah yang berdekatan dengan jalan utama Semarang – Solo menyebabkan sekolah ini mudah ditempuh. Selain itu, moda transportasi umum yang beraneka ragam juga mendukung terjadinya pelayanan pendidikan lintas batas daerah. Sementara, motivasi siswa adalah untuk mendapatkan sekolah yang baik.

Ketersediaan sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Salatiga sudah lengkap, sesuai dengan standar yang ada juga menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa dari luar daerah. Kondisi sarana dan prasarana yang baik juga memberikan kenyamanan dalam mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Kualitas sekolah yang baik juga menjadi daya tarik tersendiri bagi siswa yang berasal dari luar Kota Salatiga. Selain memiliki Akreditasi A, prestasi siswa serta *output* lulusan juga dapat menunjukkan kualitas sekolah ini.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah dilakukan pengendalian dalam pelayanan pendidikan lintas batas daerah, kondisi tersebut akan tetap terjadi Kota Salatiga seiring dengan kondisi lingkungan yang mendukung serta motivasi siswa yang besar.

Saran

a. Saran untuk Pemerintah Kota Salatiga

Seharusnya dalam penetapan peraturan untuk siswa dari dalam dan luar Kota Salatiga lebih detail, karena pada praktiknya peraturan tersebut kurang efektif. Dalam pemberian nilai tambahan berupa nilai lingkungan, tempat tinggal dan asal sekolah menjadi satu kesatuan. Jadi, untuk siswa yang daerah asalnya dari Kabupaten Semarang namun sekolah pada tahap sebelumnya (SMP) di Salatiga juga mendapatkan nilai tambahan. Oleh karena itu, peneliti memberikan rekomendasi pemberian nilai lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Salatiga, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III
Nilai Lingkungan untuk Peserta Didik Baru

No.	Uraian	Nilai Lingkungan
1.	Bertempat tinggal di Kota Salatiga	4
2.	Bertempat tinggal di luar Kota Salatiga, namun asal SMP di Kota Salatiga	3
3.	Bertempat tinggal di luar Kota Salatiga dan asal SMP di luar Kota Salatiga	2

Sumber: Analisis Peneliti, 2014

b. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Semarang

Untuk Pemerintah Kabupaten Semarang, sebaiknya lebih memperhatikan siswa di daerahnya sehingga tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Pelayanan pendidikan di daerah perbatasan harus lebih diperhatikan lagi (meningkatkan kualitas pelayanan), karena pada kenyataannya siswa yang berasal dari Kabupaten Semarang memiliki prestasi yang baik. Atau dengan mengembangkan sub pusat pelayanan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pelayanan di Kabupaten Semarang, sehingga siswa akan lebih termotivasi untuk bersekolah di wilayahnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. & Yuliana, L. 2008. Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: Aditya Media.
 Bafadal, Ibrahim. 2003. Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasinya. Jakarta: Bumi Aksara.

- Black, J.A. 1981. *Urban Transport Planning : Theory and Praticce*. London, Cromn Helm.
- Bintarto, R. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bungin, B. 2010. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- E. Mulyasa. 2009. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Faris, Ahmad Farhan. 8 Mei 2014. 11 Siswa Ikut Kompetisi Intel di Amerika. Diunduh 10 Juni 2014, dari http://nasional.inilah.com/read/detail/2098828/11-siswa-sma-ikut-kompetisi-intel-di-amerika#.U-Zo_uOSzRw
- <http://jurnalwarga.com/2014/05/06/ludika-siswa-sman-1-salatiga-peraih-medali-emas-dalam-olimpiade-geografi-dan-geosains.html>. Diunduh Kamis, 14 Agustus 2014.
- <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/06/05/263416/99-Siswa-SMA-1-Masuk-PT-Favorit>. Diunduh Kamis, 14 Agustus 2014.
- Ishartiwi. 2007. "Menjadi Guru Profesional Melalui Sertifikasi Guru". Makalah Seminar Sertifikasi Guru di Kabuipaten Bantul, Yogyakarta. LSM Endeed Study.
- Kirk J. & Miller M.L. 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hills: Sage Publications, Inc.
- Knight, Jane. 2008. *Higher education in Turmol: The changing world of internationalization*.
- Magribi, Muhammad. 1970. *Geografi Transportasi*. Yogyakarta. Fakultas Pasca Sarjana. UGM
- Mantra, Ida Bagoes. 1999. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Meleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Cetakan Keduapuluh dua*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nasoetion, L. dan J. Winoto. 1996. *Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Swasembada Pangan*. Didalam: Hermanto (eds), *Prosiding*
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014.
- Sumaatmadja, Nursid. 1998. *Studi Geografi, Suatu Pendekatan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni.
- Surakusumah, W. 2011. *Layanan Pendidikan Berkualitas: "Tercipatnya Keamanan, Kenyamanan dan Kesehatan Sekolah-MTs"*. Jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Pendidikan Indonesia. 1-12.
- Tola, Burhanuddin & Furqon. 2007. "Pengembangan Model Penilaian Sekolah Efektif." www.Skripsi-tesis.com. Diakses tanggal 13 Januari 2014.
- Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Wahmuji. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Webster' Ninth New Collegiate Dictionary. 1990
- www.sman1salatiga.sch.id. Diakses 29 November 2013.
- Zaki, Claudio. 1987. *Formal, Non Formal and Informal Education: Conception/Applicability*. American Institute of Physics, NewYork.